

LAPORAN KINERJA

Tahun 2024

STASIUN KIPM BANDUNG

Tahun 2024



BKIPM Bandung



@bkipmbandung



Bkipm Bandung



bkipm.bandung



Bkipm Bandung



www.bkipm.kkp.go.id



www.bkipm-bandung.info



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANDUNG**

JALAN CIAWITALI NO. 44 CIMAHI UTARA CIMAHI JAWA BARAT
TELEPON (022) 6649004, FAKSIMILE (022) 6649004
LAMAN www.kkp.go.id

17 Januari 2025

Yth. Plt. Kepala BPPMHKP
Cq. Ketua Tim Kerja Pelaporan Kinerja
Sekretariat BPPMHKP
di
Jakarta

SURAT PENGANTAR

Nomor: B.75 /SKIPM.BDG/KP.732/I/2025

NO	NASKAH DINAS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Bersama ini kami sampaikan: Dokumen Laporan Kinerja SKIPM Bandung Tahun 2024	1 (Satu) Dokumen	Disampaikan dengan hormat sebagai bahan laporan



Kepala SKIPM Bandung

Anak Agung Gede Eka Susila

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Stasiun KIPM Bandung Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan realisasi hasil pelaksanaan Kegiatan Stasiun KIPM Bandung selama Tahun 2024. Laporan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai gambaran dan informasi tentang capaian kinerja SKIPM Bandung Tahun 2024.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 dan penyusunan laporan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Cimahi, 17 Januari 2025



Kepala Stasiun KIPM Bandung

Anak Agung Gede Eka Susila

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
EKSEKUTIF SUMMARY	IV
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3 Arah Kebijakan dan Isu Strategis	4
1.4 Sistematika Penyajian	5
II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Sasaran	7
2.2 Indikator dan Target Kinerja	8
2.3 Pengukuran Kinerja	9
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja	11
3.2 Analisis dan Evaluasi	13
3.3 Realisasi Anggaran	41
IV. PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Rekomendasi	43
4.3 Tindak lanjut Rekomendasi	44
LAMPIRAN	45

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Bandung TA 2024.....	8
Tabel 2. Rekapitulasi Capaian Kinerja SKIPM Bandung Tahun 2024	11
Tabel 3. Target dan Realisasi IK1 Tahun 2024	15
Tabel 4 Target dan Realisasi IK2 Tahun 2024	16
Tabel 5 Target dan Realisasi IK3 Tahun 2024	17
Tabel 6 Target dan Realisasi IK4 Tahun 2024	18
Tabel 7 Target dan Realisasi IK5 Tahun 2024	19
Tabel 8 Target dan Realisasi IK6 Tahun 2024	20
Tabel 9 Target dan Realisasi IK7 Tahun 2024	21
Tabel 10 Target dan Realisasi IK8 Tahun 2024	21
Tabel 11 Target dan Realisasi IK9 Tahun 2024	23
Tabel 12 Target dan Realisasi IK10 Tahun 2024	28
Tabel 13 Target dan Realisasi IK11 Tahun 2024	29
Tabel 14 Target dan Realisasi IK12 Tahun 2024	29
Tabel 15 Target dan Realisasi IK13 Tahun 2024	30
Tabel 16 Target dan Realisasi IK14 Tahun 2024	35
Tabel 17 Target dan Realisasi IK15 Tahun 2024	38
Tabel 18 Penyerapan Anggaran Per Kegiatan Tahun 2024	41
Tabel 19 Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024	42

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung selama Tahun 2024. Capaian kinerja (performance results) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung tahun 2024 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja. Secara umum, Stasiun KIPM Bandung telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama Periode Tahun 2024.

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung telah menetapkan target kinerja Tahun 2024 dalam bentuk Kontrak Kinerja antara Kepala Stasiun KIPM Bandung dengan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang sejalan dengan Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Target Kinerja Stasiun KIPM Bandung terdiri dari 3 Sasaran Strategis (SS) dan 17 Indikator Kinerja Kegiatan dan telah dilakukan revisi sehingga menjadi 15 Indikator Kinerja.

Secara umum, Stasiun KIPM Bandung telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung Pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama periode Tahun 2024. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis (SS) dan indikator kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target indikator kinerja utama Stasiun KIPM Bandung pada Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Sasaran strategis 1 yaitu terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif.

IKU untuk SS dapat tercapai dengan baik dengan rincian sebagai berikut :

- a. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup SKIPM Bandung, target 70 % dan realisasi 100%, capaiannya 120 %;

- b. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup SKIPM Bandung, target 70 % dan realisasi 100%, capaiannya 120%;
 - c. Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik, target 70 % dan terealisasi 100%, capaiannya 120 %
 - d. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung, target 99% dan terealisasi 100%, capaiannya 101,01%
2. Sasaran strategis 2 yaitu terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif.

IKU untuk SS juga dapat tercapai dengan baik dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung, target 70% dan terealisasi 83,10%, capaiannya 118,71%
3. Sasaran Strategis 3 yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP.

Capaian IKU untuk SS ini adalah sebagai berikut :

- a. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Bandung, target 3,36 dan realisasinya 3,82, capaiannya 113,69;
- b. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung, target 86 terealisasi 91,78, capaiannya 106,72;
- c. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Stasiun KIPM Bandung, target 75, terealisasi 79,37, capaiannya 105,83;
- d. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT SKIPM Bandung, target 82 terealisasi 83,65, capaiannya 102,01;
- e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung, target 71 terealisasi 86,67, capaiannya 120;
- f. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung, target 93,76 terealisasi 95,59, capaiannya 101,95%;
- g. Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung, targetnya 100% dan terealisasi 100%, capaiannya 100%

- h. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Stasiun KIPM Bandung dari target 80%, realisasi 100% sehingga persentase capaian nilai kinerja sebesar 120%;
- i. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup SKIPM Bandung, target 80 terealisasi 84,34, capaiannya 105,43
- j. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup UPT SKIPM Bandung, target 80 dan terealisasi 97,50, capaiannya 120%

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung Tahun 2024 dengan sasaran strategis sebanyak 3 sasaran Strategis dan 15 Indikator Kinerja Utama dengan kategori capaian sasaran berhasil. Keberhasilan pencapaian tersebut diupayakan untuk semakin ditingkatkan, sedangkan untuk beberapa kegiatan yang belum terlaksana akan diupayakan untuk dapat dilaksanakan sesuai target.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas Stasiun KIPM Bandung dan menjadi umpan balik peningkatan kinerja Stasiun KIPM Bandung pada periode berikutnya. Keberhasilan pelaksanaan dalam mendukung pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai di lingkungan Stasiun KIPM Bandung dengan semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan perikanan melalui peningkatan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta system jaminan mutu dan kewanaman hasil perikanan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bahwa Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Bandung merupakan kepanjangan tangan dari BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKIPM Bandung dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama triwulan I tahun 2024. Di samping itu juga sebagai sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja SKIPM Bandung. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, SKIPM Bandung merupakan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, SKIPM Bandung menyelenggarakan fungsi: a) pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia; b) pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan; c) pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain; d) pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; e) pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity); f) pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi; g) pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu; h) pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; i) pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan; j) pelaksanaan

surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan; k) pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu; l) penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium; m) penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; n) pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan o) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKIPM, Kepala Stasiun dibantu oleh Kepala Urusan Umum, 1 orang Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama, 1 orang Asisten Inspektur Mutu Penyelia, 1 Orang Pranata Pengelola Keuangan APBN, 1 Orang Penatalaksana Barang Terampil, 4 orang staf pelaksana, dan 7 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 3 orang PJLP.

Struktur organisasi SKIPM Bandung dapat dilihat dalam Gambar 1



Gambar 1 Struktur Organisasi SKIPM Bandung

1.3 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Stasiun KIPM Bandung disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi Stasiun KIPM Bandung adalah sebagai berikut:

- Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
- Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
- Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan
- Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun

antar area di dalam wilayah NKRI

- Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan joint inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- Strategi yang dilaksanakan dalam dan metode pengujian, serta informasi publik.
- Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
- Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.
- Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBK-BKIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBK berbasis digital.

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian LKj Stasiun KIPM Bandung Triwulan I Tahun 2024 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

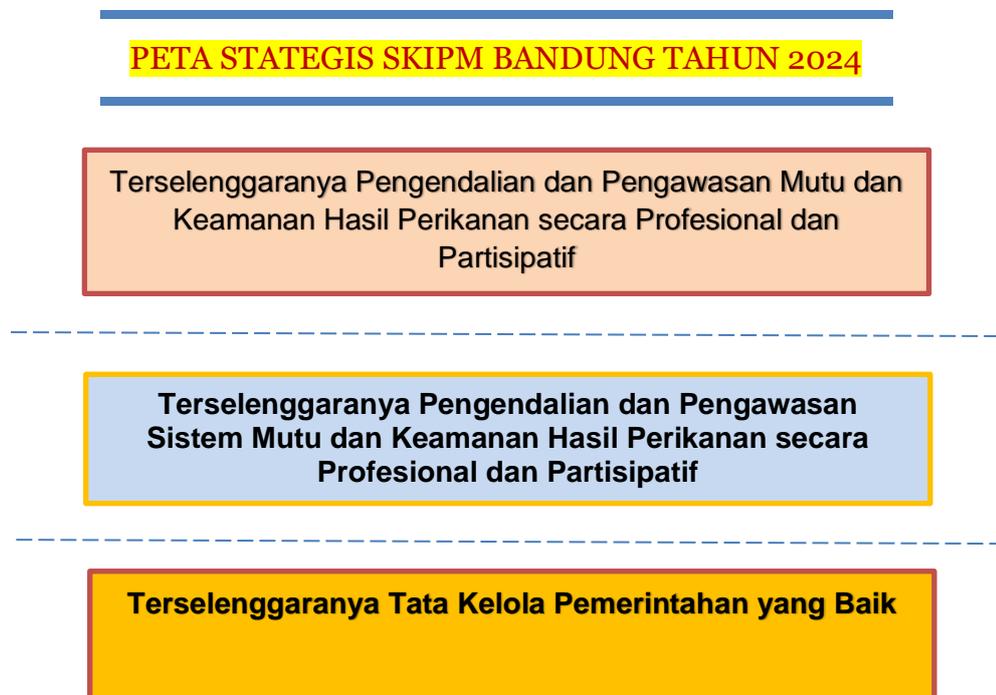
- Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;

- Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;

BAB II.
PERENCANAAN KINERJA

2.1 SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja BKIPM Bandung tahun 2024 ditunjukkan pada Gambar 2 dan Tabel 1 di bawah ini.



Gambar 2 **Peta Strategi SKIPM Bandung tahun 2024**

2.2 INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Pada Tahun 2024 Stasiun KIPM Bandung mempunyai indikator sebanyak 17 Indikator, namun pada bulan Oktober 2024 terjadi perubahan perjanjian Kinerja dan berubah menjadi 15 indikator, sebagaimana tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 Indikator dan Target Kinerja SKIPM Bandung Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
				2024
SK1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70
		3	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	99
SK2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70
SK3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Stasiun KIPM Bandung	6	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Bandung (Nilai indeks)	3,36
		7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Bandung (Indeks)	86
		8	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup SKIPM Bandung (Nilai)	75
		9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT SKIPM Bandung (Nilai)	82

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
				2024
		10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT SKIPM Bandung (Nilai)	71
		11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup UPT SKIPM Bandung (Nilai)	93,76
		12	Presentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT SKIPM Bandung (%)	100
		13	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT SKIPM Bandung (%)	80
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP Lingkup SKIPM Bandung (%)	80
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup SKIPM Bandung (%)	80

2.3 PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:
 - a. Polarisasi *Maximize*
Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:
Indeks Capaian IKU = $\text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$
 - b. Polarisasi *Minimize*
Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:
Indeks Capaian IKU = $\{(1 + (1 - \text{Realisasi} / \text{Target}))\} \times 100\%$
 - c. Polarisasi *Stabilize*

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

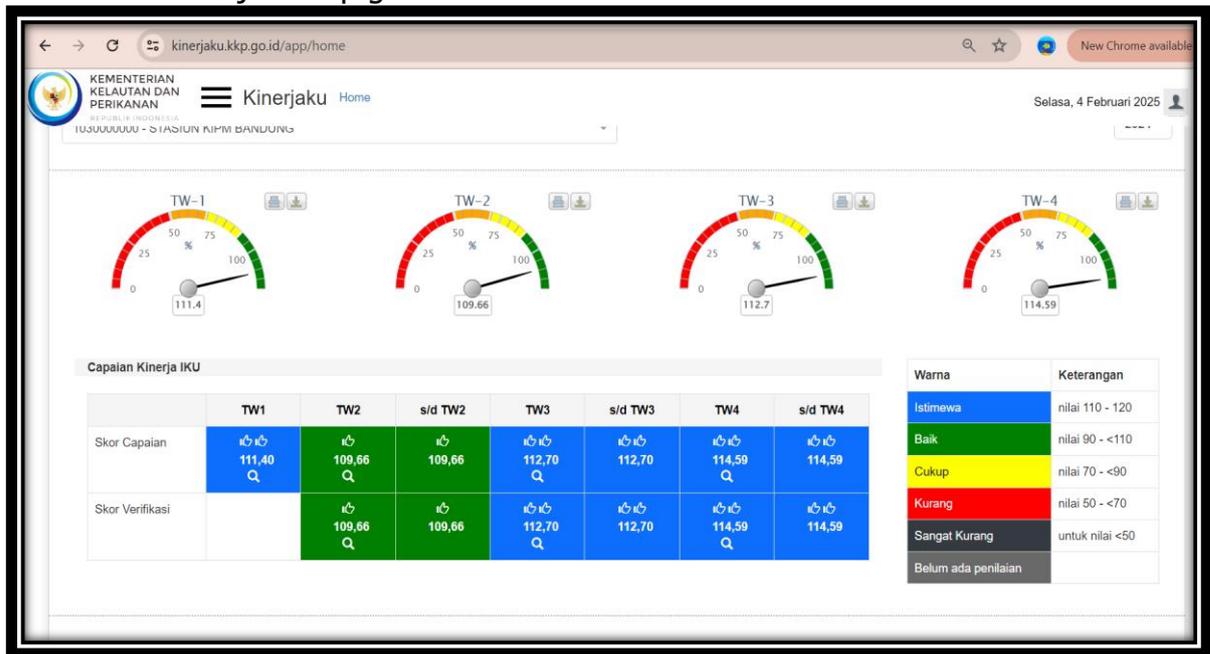
4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :

	$100 \leq X \leq 120$ (memenuhi ekspektasi)
	$80 \leq X \leq 100$ (belum memenuhi ekspektasi)
	$X \leq 100$ (Tidak memenuhi ekspektasi)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja SKIPM Bandung pada Tahun 2024 adalah Istimewa, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 114,59 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id.



Gambar 3 Dashboard Capaian IKU Pada SAPK

Rekapitulasi capaian kinerja SKIPM Bandung pada Tahun 2024 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel 2

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASI	%
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu						
SK1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70	100	120

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASI	%
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70	98,72	120
		3	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70	100	120
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	99	100	101,01
SK2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70	83,10	118,71
SK3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Stasiun KIPM Bandung	6	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Bandung (Nilai indeks)	3,36	3,82	113,69
		7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Bandung (Indeks)	86	91,78	106,72
		8	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup SKIPM Bandung (Nilai)	75	79,37	105,83
		9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT SKIPM Bandung (Nilai)	82	83,65	102,01
		10	Nilai Kinerja Perencanaan	71	86,67	120

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASI	%
			Anggaran lingkup UPT SKIPM Bandung (Nilai)			
		11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup UPT SKIPM Bandung (Nilai)	93,76	95,59	101,95
		12	Presentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT SKIPM Bandung (%)	100	100	100
		13	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT SKIPM Bandung (%)	80	100	120
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP Lingkup SKIPM Bandung (%)	80	84,34	105,43
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup SKIPM Bandung (%)	80	97,50	120

3.2 ANALISIS DAN EVALUASI

Kegiatan Pengendalian Mutu

Capaian kinerja SKIPM Bandung pada Kegiatan Pengendalian Mutu berasal dari satu sasaran strategis, yakni Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan.

Sasaran Strategis 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan SKIPM Bandung. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur

keberhasilan sasaran Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan (Kegiatan Pengendalian Mutu) lingkup UPT SKIPM Bandung.

IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup SKIPM Bandung

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Pada Tahun 2024, indikator ini mempunyai target 70 %, dan realisasinya sebesar 100. Indikator ini merupakan indikator baru yang merupakan Revisi Perjanjian Kinerja pada bulan Oktober 2024. Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah :

- Validasi sertifikasi produksi primer
- Infeksi ke Lokasi usaha

Permasalahan utama dalam indicator ini adalah indicator ini merupakan indicator baru yang sebelumnya tidak ada, indicator ini muncul karena ada perubahan SOTK di pusat dan indicator ini merupakan pelimpahan dari eselon I lain sebelumnya, sehingga dengan waktu yang mepet menjadikan kegiatan ini kurang optimal.

Tabel 3 Target dan Realisasi IK1 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun					Tahun 2024			Tahun 2024		Renstra2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	Persen	Target	Persen
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup SKIPM Bandung	-	-	-	-	-	70	100	120	70	120	70	120

IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk

perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI), Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku, dan Standar Internasional (Codex Alimentarius);

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing).

Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011.

Pada 2024 indikator ini ditargetkan 70 % dan terealisasi sebesar 98,72%. Hal ini terlihat dari capaian sertifikasi produk HACCP dari target 20 sertifikat dan terealisasi 20 sertifikat atau 100%, sedangkan untuk SKP dari target 39 SKP yang terelisasi 38 atau 97,44 %. Sehingga apabila berdasarkan cara perhitungannya :

$$\%X = \frac{A+B}{xn} X 100\% \quad \%X = \frac{HACCP+SKP}{2} X 100\% \quad \%X = \frac{100+97,44}{2} X 100\%$$

$$\% X = 98,72\%$$

Indikator ini merupakan indicator baru pada tahun 2024, sehingga belum bisa

dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Kegiatan yang mendukung indikator ini yaitu Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP dan melakukan Bimtek Pengendali Mutu Hasil Perikanan, serta validasi pengajuan SKP.

Selain hal tersebut, capaian 98,72 % ini juga diraih dari efisiensi SDM, yaitu kegiatan inspeksi penerapan HACCP hanya dilakukan oleh 1 orang fungsional Inspektur mutu dan asisten inspektur mutu atau sebesar 20 % dari total pegawai ASN SKIPM Bandung sebanyak 10 orang.

Selain dari sisi efisiensi SDM, capaian ini juga tidak lepas efisiensi teknologi yang digunakan, yaitu sistem informasi berupa platform aplikasi honest (HACCP Online System) yang dikelola oleh BPPMHKP bersama dengan PUSDATIN-KKP pada link <http://haccp.bkipm.kkp.go.id/h3/login/>. Sistem ini telah digunakan sejak tahun 2007 dan saat ini telah digunakan hampir disemua kantor pelayanan BPPMHKP di seluruh Indonesia. Pelayanan dengan aplikasi honest selain mempermudah layanan juga akan merekam semua kegiatan Tindakan yang dilakukan dalam proses sertifikasi mutu untuk kegiatan ekspor, impor dan domestik serta informasi kegiatan monitoring dan surveilen.

Tabel 4 Target dan Realisasi IK2 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	TAHUN					TW I 2024			2024		Renstra2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	%	Target	%
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup SKIPM Bandung	-	-	-	-	-	70	98,72	120	70	120	70	120

IK3. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI Lingkup SKIPM Bandung

Dalam rangka mendukung Intruksi Presiden Nomor 01 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan mengemban tugas untuk 1) meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat; dan 2) mengawasi

mutu dan keamanan hasil perikanan

Untuk mengimplementasikan inpres dimaksud terkait mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan, maka perlu adanya peningkatan pengawasan mutu produk perikanan, dengan harapan produk perikanan yang dipasarkan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Indikator ini pada tahun 2024 berubah satuan targetnya dari yang tadinya jumlah lokasi menjadi persentase. Indikator ini pada tahun ditargetkan 70%, dan terealisasi 100%.

Perhitungan indicator ini yaitu dengan menghitung persentase dari Jumlah kab/kota /yang dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI dibagi dengan Jumlah kab/kota/yang ditetapkan untuk dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI.

$$X\% = A/B \times 100\%$$

X% = Persentase pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI

A = Jumlah kab/kota /yang dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI

B = Jumlah kab/kota/yang ditetapkan untuk dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI

Capaian pada tahun 2024 terdapat 4 kabupaten kota yaitu :

No	PELAKSANAAN	
	KAB/KOTA	LOKASI
1	Kota Bandung	Pasar Kosambi
		Pasar Modern Citylink Bandung
2	Kota Cimahi	Pasar Antri
		Superindo Cimahi
1	Sukabumi	TPI Ciwaru
		TPI Pelabuhan Ratu
2	Kab Bandung	Pasar Sehat Soreang
		Pasar Ciparay

Bila dibandingkan dengan tahun 2023, sama-sama terealisasi 4 lokasi, dengan target yang sama. Capaian indicator ini telah menyumbang 4 lokasi atau 4,4 % dari capaian pusat sebanyak 91 lokasi, dan telah memenuhi target dari Renstra tahun 2020-2024 sebanyak 4 lokasi.

Selain itu, tercapainya indikator ini merupakan hasil efisiensi sumberdaya manusia

berupa kolaborasi antara SKIPM Bandung dengan Dinas KP Kabupaten/Kota, BPPOM dan instansi terkait lainnya. Melalui kegiatan monitoring pengawasan mutu hasil perikanan Domestik sebagai implementasi dari Inpres No. 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan sehat serta sosialisasi terkait dengan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik yang dilakukan kepada pelaku usaha perikanan baik di pasar modern, pasar tradisional, pelabuhan pendaratan ikan dan supplier.

Kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dalam rangka penerapan Inpres 01 Tahun 2017 tentang Masyarakat Hidup Sehat terdiri dari :

- a. Inspeksi sarana prasarana, carapengolahan yang baik (GMP), persyaratan prosedur operasi sanitasi standar (SSOP) dan penanganan ikan yang baik/Good Handling Practices (GHdP) terhadap pasar tradisional dan modern;
- b. Pengambilan contoh dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan untuk masing-masing lokus yang telah ditentukan, dengan jumlah contoh minimal 5 (lima) atau 10% dari jumlah ikan yang ada di masing-masing lokus.
- c. Pengujian contoh dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan sesuai dengan parameter yang telah ditentukan, yaitu :
 - Pengujian kesegaran ikan (organoleptik);
 - Pengujian mikrobiologi (Total Plate Count, E. coli, Salmonella dan parameter lain apabila dibutuhkan);
 - Pengujian kimia (bahan kimia yang kemungkinan sengaja ditambahkan dan berdampak pada kesehatan, yaitu formalin dan bahan kimia lainnya yang tidak diperbolehkan untuk pangan).

Tabel 5 Target dan Realisasi IK3 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Tahun					TW I 2024			2024		Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	%	Target	%
Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI Lingkup SKIPM Bandung	-	-	-	-	-	70	100	120	70	120	70	120

IK4. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung

Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan unit usaha yang telah menerapkan prinsip-prinsip HACCP dan CKIB. Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Permen KP No.19/2010. Sedangkan unit usaha yang menerapkan prinsip CKIB adalah unit usaha yang telah melaksanakan manajemen kesehatan ikan berdasarkan standar biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan.

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2024 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 indikator ini ditarget sebesar 99 % dan terealisasi 100%, hal ini dilihat dengan tidak adanya penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor

(HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor) dari jumlah HC yang diterbitkan sebanyak 248 HC.

Kegiatan pendukung untuk mencapai target indicator ini yaitu inspektur mutu telah melaksanakan kegiatan surveilan/inspeksi/verifikasi dan stuffing serta pengambilan sample ke UPI.

Tabel 6 Target dan Realisasi IK4 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Tahun					Tahun 2024			2024		Renstra2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Tar	%	Target	%
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung	-	-	-	-	-	99	100	101,01	99	101,01	99	101,01

Kegiatan Manajemen Mutu

Capaian kinerja SKIPM Bandung pada Kegiatan Manajemen Mutu berasal dari satu sasaran strategis, yakni Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif.

Sasaran Strategis 2. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamnan hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BPPMHKP. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif (Kegiatan Standarisasi dan Sistem Kepatuhan) lingkup UPT SKIPM Bandung.

IK5. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung

Nilai mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi: Ruang Lingkup; Acuan Normatif; Persyaratan Umum; Persyaratan Struktural; Persyaratan Sumber Daya; Persyaratan Proses; dan Persyaratan Sistem Manajemen

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi: Persyaratan Umum; Persyaratan Struktural; Persyaratan Sumberdaya: Persyaratan Proses; dan Persyaratan Sistem Manajemen

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar.

Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2024. Indikator ini mempunyai target sebesar 70% dan pada tahun 2024 ini terealisasi sebesar

83,10%. Indikator ini dinilai oleh Pusat Manajemen Mutu, sehingga Upt hanya menerima hasil penilaiannya.

Tabel 7 Target dan Realisasi IK5 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Tahun					2024			2024		Renstra2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Tar	%	Tar	%
Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung	-	-	-	-	-	70	83,10	118,71	70	118,71	70	118,71

Kegiatan Dukungan Manajemen

Capaian kinerja SKIPM Bandung pada Kegiatan Dukungan Manajemen berasal dari satu sasaran strategis, yakni Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPPMHKP.

Sasaran Strategis 4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPPMHKP

Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPPMHKP menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BPPMHKP. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup SKIPM Bandung

IK6. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Bandung

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat diakses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisisioner dari seluruh UPT BPPMHKP

Indikator ini pada Tahun 2024 dengan target indeks sebesar 3,36, dan terelaborasi sebesar 3,82. Indikator ini merupakan indikator baru, Dimana pada tahun sebelumnya adalah nilai IKM, sehingga karena perbedaan satuan, tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Berdasarkan Memorandum dari Sekretariat BPPMHKP Nomor 95/BPPMHKP.1/KI.120/I/2025 tanggal 6 Januari 2025, SKIPM Bandung menempati urutan ke 20 dari 47 UPT dengan Indeks 3,82 dan nilai SKM sebesar 95,44.

Kegiatan yang telah dilakukan antara lain :

- Melakukan proses Survei Kepuasan Masyarakat kepada pada pengguna jasa,
- Mengolah hasil Survey
- Menyajikan serta melaporkan hasil SKM.
- Mensosialisasikan nilai SKM kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media social maupun papan iklan

Tabel 8. Target dan Realisasi IK6 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Tahun					2024			2024		Renstra2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Tar	%	Tar	%
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Bandung	-	-	-	-	-	3,36	3,82	113,69	3,36	113,69	3,36	113,69

IK7. Indeks Profesionalitas ASN

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen

PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi :

- a. Kualifikasi;
 - b. Kompetensi;
 - c. Kinerja; dan
 - d. Disiplin.
- Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan
 - f. Pendidikan di bawah SLTA.

dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan DII/DI/SMA	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

Berdasarkan Surat dari Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara No. 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 Tanggal 22 Mei 2023,

perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022, maka terdapat beberapa penyesuaian dari dimensi Kualifikasi sebagai berikut:

1. Perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki;
2. Bagi pejabat administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional mendapatkan bobot yang sama dengan pejabat fungsional yang telah mengikuti pelatihan fungsional berdasarkan hasil koordinasi Instansi Pengguna dengan Instansi Pembina dan melampirkan bukti berupa surat keterangan/rekomendasi yang selanjutnya dimutakhirkan ke dalam SIASN.

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA/Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

- Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-

0	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22.5
1	Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17.5
1	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
0	Tidak Pernah Ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

Penyesuaian Kompetensi sebagai berikut:

- 1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional;
 - 2) Riwayat pelatihan teknis dan diklat pendukung/seminar/workshop /sejenisnya dapat melalui jalur pelatihan secara klasikal dan/atau nonklasikal;
- Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d dibawah	1

Penyesuaian dimensi Kinerja sebagai berikut:

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

- Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

• Nilai	• Nama Hukuman Disiplin	• Nilai Disiplin
• 0	• Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	• 5
• R	• Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	• 3
• S	• Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	• 2
• B	• Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	• 1

Penyesuain dimensi Disiplin yaitu: Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir, bukan 5 tahun lagi.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- Kualifikasi** dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi e-Pegawai Online KKP.
- Kompetensi** diolah datanya dari aplikasi e-Pegawai Online KKP dengan ketentuan sbb:

- Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsionak/Teknis, Diklat 20

- JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
- **Pejabat Struktural** wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40;
 - Pejabat Fungsional wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
 - Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
 - Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional.
- c. **Kinerja** diolah datanya dari aplikasi Kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada aplikasi SIASN BKN dengan nilai Kinerja dari Kategori;
- d. **Disiplin** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang **tidak pernah/pernah** dijatuhi hukuman disiplin selama 1 tahun terakhir dan di update pada aplikasi e-Pegawai.
- b. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

- Kategori Penilaian IP ASN antara lain

Nilai	Kategori
91 – 100	Sangat Profesional/sangat tinggi
81 – 90	Cenderung profesional/tinggi
71 – 80	Rentan tidak profesional/sedang
61 – 70	Cenderung tidak profesional/
≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah

Pada Tahun 2024 target 86 dan terealisasi 91,78, bila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami kenaikan penurunan dimana tahun 2023 sebesar 92,26, pada tahun 2022 terealisasi 82,38 dan tahun 2021 sebesar 87,62, dan capaian indikator ini terhadap target Renstra 2020-2024 sebesar 104,30 % dari target 88.

Berdasarkan aplikasi IP ASN KKP, Capaian IP ASN KKP sebesar 88,44, bila dibandingkan IP ASN Stasiun KIPM Bandung masih lebih besar daripada Capaian IP ASN KKP yaitu sebesar 91,78.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai target indikator ini adalah : menginput sertifikat diklat semua pegawai yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 sehingga nilai kompetensi bisa meningkat, menginput SKP Tahun 2023 dengan baik pada aplikasi SKP KKP, disiplin dalam bekerja sehingga meminimalisir terkena hukuman disiplin.

Tabel 9. Target dan Realisasi IK7 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi tahun					Tahun 2024			2024		Renstra2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Tar	%	Target	%
Indeks Profesionalitas ASN	-	-	87,62	82,38	92,26	86	91,78	106,72	86	106,72	88	104,30

IK8. Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas 75 pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya.

Unit yang diarahkan berpredikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan mengacu kepada PermenKP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Nilai minimum untuk berpredikat WBK dicapai dengan evaluasi untuk memperoleh hasil nilai WBK ≥ 75 yang terdiri dari: Nilai Pengungkit yang diperoleh

dari aspek Pemenuhan dan Reform (manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, pelayanan publik) dan Nilai Hasil yang diperoleh dari komponen birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Penilaian Unit Kerja dilingkungan BPPMHKP dengan kriteria penilaian sesuai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) secara mandiri dan menggunakan pedoman teknis sesuai dengan Peraturan Irjen KKP Nomor 58/PER-IRJEN/2020 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) BPPMHKP Tahun 2024 terkait dengan Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM yaitu Nilai minimal yang dipersyaratkan adalah 75 (tujuh puluh lima). Sehubungan dengan hal tersebut bahwa Tim Penilai Mandiri Sekretariat BPPMHKP telah melakukan pendampingan pada periode Semester I dan Semester II Tahun 2024, dengan hasil untuk Stasiun KIPM Bandung mencapai nilai 79,37

Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini adalah pemenuhan dokumen dan Reform dari semua area, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Selain itu, tercapainya indikator ini merupakan hasil efisiensi sumberdaya manusia berupa kolaborasi semua pegawai dengan jumlah pegawai yang hanya 10 Orang ASN, 7 Orang PPNPN dan 3 orang PJLP.

Berdasarkan Memo dari Sekretariat BPPMHKP, dari 5 UPT yang masuk penilaian WBK tahun 2024, Stasiun KIPM Bandung menempati urutan ke 4 dari 5 UPT dengan nilai 79,37.

Tabel 10 Target dan Realisasi IK8 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Tahun					Tahun 2024			2024		Renstra2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%			Target	%
Nilai Minimal yang dipersyaratkan Mendapatkan Predikat WBK	-	-	-	-	78,05	75	79,37	105,83	75	105,83	75	105,83

IK9. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP SKIPM Bandung dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni : perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (25%).

FORMULASI PERHITUNGAN

- Nilai PM SAKIP (Unit Kerja Level 2) adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Sekretariat Es.1
- atas implementasi SAKIP di (Unit Kerja Level 2)
- Kategori nilai PM SAKIP (Unit Kerja Level 2) yaitu:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Pada Tahun 2024 Indikator ini ditargetkan nilai sebesar 82, dan terealisasi sebesar 83,65 atau sebesar 102,01%. Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2024, sehingga tidak relevan untuk dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah pemenuhan dokumen SAKIP yang dipersyaratkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat BPPMHKP nomor B.12/BPPMHKP.1/RC.610/I/2025 tanggal 2 Januari Perihal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP TA 2024 UPT Lingkup BPPMHKP, Stasiun KIPM Bandung menempati urutan ke 9 dari 51 satker.

Tabel 11 Target dan Realisasi IK9 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun					Triwulan III 2023			2024		Renstra2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Tar	%	Target	%
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP	-	-	-	-	-	82	83,65	102,01	82	102,01	82	102,01

IK10. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya

Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terj adi dalam Pemangku Kepentingan se bagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kernenterian / Lembaga

Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah

- Pembobotan Nilai Kinerja Anggaran antara lain:
 - a. Aspek manfaat dan implementasi 50%
 - b. Rata-rata satker 50%
- Kategori Capaian Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain
 - a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
 - b. Baik, apabila NKA >80 - 90;
 - c. Cukup, apabila NKA >60 - 80;
 - d. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
 - e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

FORMULASI PERHITUNGAN

Formula Aspek Implementasi

$$NKI = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (COP \times W_{COP}) \text{ atau } CRO \times W_{CRO} + (NE \times W_E)$$

Keterangan :

NKI : nilai kinerja atas aspek implementasi

P : penyerapan anggaran

K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

COP : capaian output program

CRO : capaian ro

NE : nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja

W_p : bobot penyerapan anggaran

W_k : bobot konsistensipenyerapan anggaran terhadap perencanaan

W_{COP} : bobot capaian Output Program

W_{CRO} : bobot capaian RO

Pada Tahun 2024 indikator ini mempunyai target sebesar 71, dan berdasarkan aplikasi DJA Smart nilai yang didapat Stasiun KIPM Bandung sebesar 86,67 atau sebesar 120%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dengan capaian 85,40 dan tahun 2022 sebesar 83,70, maka tahun 2024 mengalami peningkatan capaian.

Berdasarkan Nota Dinas dari Biro Keuangan Nomor 182/SJ.2/TU.210/I/2025, tanggal 15 Januari 2025 perihal Capaian Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, Stasiun KIPM Bandung berada di urutan ke 35 dengan nilai 86,67, dari 48 Satker lingkup BPPMHKP.

Stasiun KIPM Bandung telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan resource SDM dan waktu kerja. Sumber efisiensi anggaran terutama berasal dari efisiensi pelaksanaan anggaran dan efisiensi pelaksanaan tugas. Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai indikator ini adalah rutinitas peninputan capaian output dan anggaran pada aplikasi DJA Smart

Tabel 12 Target dan Realisasi IK10 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	TW I Tahun					TW I tahun 2024			2024		Renstra2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Tar	%	Target	%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	-	-	-	83,70	85,40	71	86,67	120	71	120	71	120

IK11. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung

IKPA adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ;
- c. Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA > 70

Pada Tahun 2024 indikator ini ditargetkan sebesar 93,76 dan terealisasi sebesar 95,59 atau sebesar 101,95 %. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun tahun sebelumnya yang mana tahun 2023 capaiannya sebesar 96,34 dan Tahun 2022 sebesar 95,26, maka tahun 2024 ini mengalami penurunan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam meningkatkan nilai IKPA antara lain :

- Melakukan review DIPA per triwulan serta meminimalkan atau menunda revisi pergeseran antar jenis belanja di akhir triwulan yang dapat menyebabkan penyerapan anggaran berubah di akhir triwulan
- Melakukan review anggaran tiap bulan untuk memastikan pelaksanaan pencairan anggaran sesuai dengan RPD yang sudah dibuat serta menyelaraskan Halaman III DIPA sesuai dengan realisasi anggaran yang diserap dan target penyerapan anggaran triwulan yang akan datang. Kemudian mengajukan revisi

Hal III DIPA sebelum batas akhir cut off RPD triwulanan pada sepuluh hari kerja pertama setiap triwulan.

- Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan, terjadwal sesuai RPD dan target penyerapan anggaran dan kegiatan pertriwulan, perjenis belanja yang telah ditetapkan. Serta melakukan percepatan belanja khususnya belanja barang baik berupa belanja bahan, persediaan, barang operasional/non operasional maupun belanja perjalanan dinas. Yang tidak terkendala AA, Refokusing dan Juknis
- Mengidentifikasi dan mempersiapkan Pengadaan Barang Jasa pada tahun anggaran 2023 dan memastikan pengadaan barang dan jasa yang sifatnya sekaligus serta menyampaikan data kontrak belanja barang dan modal tepat waktu dengan nilai dibawah Rp50 juta. Dan kontraktual dibawah 200juta, agar pelaksanaannya dilaksanakan pada Triwulan I. dan Persiapan pelaksanaan Fisik Barang Jasa pada Triwulan II untuk nilai 200juta ke atas
- melakukan pembayaran dengan menyampaikan SPM Langsung Kontraktual tepat waktu paling lambat 17 hari kerja dari tanggal berita acara serah terima atau berita acara pembayaran pekerjaan
- menghitung kembali kebutuhan operasional Rutin bulanan satker dalam menggunakan UP tunai secara efektif dan efisien sehingga pertanggungjawaban UP dan TUP dapat tepat waktu serta maksimal tanpa adanya setoran pengembalian dana TUP ke kas negara. Serta Memonitor status penggunaan UP/TUP pada Aplikasi OMSPAN (Karwas UP/TUP dan detail data IKPA UP/TUP).
- melakukan pemantauan progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana dan menetapkan mitigasi resiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran
- melakukan proses penginputan dan pelaporan capaian output, antara lain menghitung tingkat kemajuan aktivitas (progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO), melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan disiplin tepat waktu paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya. Menetapkan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola,

khususnya untuk output yang memiliki karakteristik beragam. Melakukan percepatan kegiatan sesuai target capaian RO triwulan I dan II sesuai target PCRO yang diproyeksikan sama dengan target penyerapan anggaran triwulan I dan II dalam DIPA. Selalu memonitor status data pada Aplikasi OMSPAN dan memastikan status data telah Terkonfirmasi

Tabel 13 Target dan Realisasi IK11 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	TW I Tahun					TW I Tahun 2024			2024		Renstra2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Tar	%	Target	%
Nilai IKPA	-	-	-	97,24	96,34	93,76	95,59	101,95	93,76	101,95	93,76	101,95

IK12. Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas system pengendalian intern. Pada tahun 2024 indikator ini ditargetkan 100 %, dan pada tahun 2024 tercapai 100% karena tidak ada temuan pada tahun 2023.

Berdasarkan Nota Dinas dari Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 1628/ITJ.0/IX/2024 tanggal 30 September 2024, bahwa temuan BPK atas BPPMHKP dengan nilai Rp. 11.350.000, dari Realisasi anggaran Rp. 497.626.943.467 atau sebesar 0,0023%, dan dari temuan tersebut tidak ada dari Stasiun KIPM Bandung. Keberhasilan capaian indicator ini didukung dengan tertibnya pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern

Tabel 14 Target dan Realisasi IK12 pada Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Tahun					2024			2024		Renstra2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%			Tar	%
Persentase Penyelesaian Temuan BPK	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100

IK13. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja

Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan. Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH. Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis1 dan 2 dalam *Three Lines of Defense* sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya.

Pada Tahun 2024 indikator ini ditargetkan sebesar 80 %, Berdasarkan data SIDAK Itjen, menunjukkan bahwa SKIPM Bandung pada Tahun 2024 telah menuntaskan 100 % perbaikan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 indikator telah menuntaskan sama sama 100 % perbaikan. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022, indicator ini mengalami kenaikan capaian yang mana pada tahun 2022 hanya tercapai 80, namun apabila dibandingkan dengan target pada Renstra 2020-2024 telah mencapai 117,65 % dari target 85%.

Tabel 15 Target dan Realisasi IK13 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Tahun					Tahun 2024			2024		Renstra2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Tar	%	Target	%
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	-	-	80	80	100	80	100	120	80	120	85	117,65

IK14. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat Kepatuhan PBJ diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

1. RUP telah diupload kedalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%)
3. Laporan Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%)
4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (30%)

Indikator ini merupakan IKU baru pada tahun 2022, pada tahun-tahun sebelumnya belum ada. Pada tahun 2023 target indicator ini sebesar 77,5 dan terealisasi 78,26. Dan pada Tahun 2024 target indicator ini sebesar 80 dan terealisasi 84,34 atau sebesar 105,43. Nilai ini diambil dari capaian BPPMHKP hasil penilaian oleh Inspektorat Jenderal berdasarkan surat nomor B.519/ITJ.4/HP.660/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024.. Indikator ini tercapai diatas target dikarenakan adanya kegiatan yang mendukung antara lain :

- Penyusunan Manajemen Resiko PBJ pada awal tahun 2024
- Penyusunan dokumen perencanaan dan persiapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun 2024 oleh PPK maupun PBJ
- Penginputan RUP Tahun 2024 tepat waktu dan sesuai
- PBJ dan PPK telah menyusun Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Yang masih harus dilengkapi adalah proses pengadaan barang dan jasa Stasiun KIPM Bandung pada tahun 2024 harus sudah memperbanyak menggunakan aplikasi SPSE, sehingga akan meningkatkan nilainya.

Tabel 16 Target dan Realisasi IK14 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	tahun					Tahun 2024			2024		Renstra2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Tar	%	Target	%
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	76,21	78,26	80	84,34	105,43	80	105,43	80	105,43

IK15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengelolaan BMN sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat Kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

- Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (10%)
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%)
- Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian Kembali (revaluasi asset) tahun 2018-2023 (20%)
- Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 di dukung Berita Cara Serah Terima Acara Pemakaian (25%)
- Penyusunan Laporan BMN (semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (20%)

Indikator ini merupakan IKU baru pada tahun 2022, sehingga pada tahun-tahun sebelumnya belum ada. Pada tahun 2023 indikator ini ditargetkan sebesar 77,5 dengan realisasi 99,46. Dan pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 80 dan terealisasi 97,50. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris BPPMHKP Nomor : B. 67/BPPMHKP.1/PL.760/I/2025 tanggal 3 Januari 2025, maka semua UPT termasuk Stasiun KIPM Bandung mendapatkan nilai 97,50. Apabila dibandingkan dengan target Renstra 2022-2024 tercapai 120 % yang mana targetnya 80, namun apabila dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 99,46%, maka tahun 2024 mengalami penurunan.

Indikator ini mencapai realisasi diatas target dikarenakan pemenuhan dokumen parameter yang terpenuhi 100%.

Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini adalah :

- Penatalaksana Barang Stasiun KIPM Bandung sudah melakukan rekonsiliasi

BMN semester 1 dan 2 tahun 2024

- Penatalaksana Barang Stasiun KIPM Bandung telah menyusun Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2024, dan sudah membuat laporan tingkat pemanfaatan BMN dengan baik dan tepat
- Penatalaksana Barang sudah melakukan Inventarisasi BMN sejak Tahun 2018-2023 dan sudah dilakukan penilaian Kembali
- Penatalaksana Barang Stasiun KIPM Bandung sudah Menyusun Laporan BMN Tahun 2024 baik semesteran maupun tahunan secara tepat waktu

Tabel 17 Target dan Realisasi IK15 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Tahun					Tahun 2024			2024		Renstra2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Tar	%	Target	%
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN	-	-	-	100	99,46	80	97,50	120	80	120	80	120

3.3 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran SKIPM Bandung pada tahun anggaran (T.A) 2024 adalah sebesar Rp. 3.883.534.000 dan terjadi revisi sehingga menjadi Rp. 3.809.803.000 telah terealisasi sebesar Rp. 3.370.067.970 atau sebesar 98.96 % Realisasi penyerapan anggaran SKIPM Bandung T.A 2024 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 20 dan Tabel 21.

Tabel 18. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Tahun 2024

No	KODE	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	RAELISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	7010	Manajemen Mutu	89.514.000	53.042.457	59,26
2	3989	Pengendalian Mutu	157.648.000	157.475.037	99,89
4	3987	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	3.562.641.000	3.559.550.458	99,91
		TOTAL	3.809.803.000	3.770.067.970	98,96

Tabel 21. Penyerapan Anggaran per Jenis Akun Tahun 2024

	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	1.643.287.000	1.643.243.791	100
2	Belanja Barang	2.166.516.000	2.126.824.179	98,17
3	Belanja Modal	-	-	
	TOTAL	3.809.803.000	3.770.067.970	98,96

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Stasiun KIPM Bandung Tahun 2024 menyajikan keberhasilan dan kegagalan capaian sasaran kinerja Stasiun KIPM Bandung pada tahun 2024, yang tercermin dalam capaian indikator kinerja utama. Capaian kinerja SKIPM Bandung pada Tahun 2024 sudah ***ISTIMEWA***, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Triwulan I sebesar 111,40, Triwulan II sebesar 109,66, Triwulan III sebesar 112,70 dan Triwulan IV sebesar 114,59, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id. Dari 15 Indikator Kinerja terdapat 14 (93,33%) indikator kinerja yang capaiannya melebihi target dan terdapat 1 (6,66%) Indikator Kinerja yang realisasinya sesuai target.

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Stasiun KIPM Bandung pada tahun 2024, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

- Pada Tahun 2025, Stasiun KIPM Bandung tidak menerima DIPA 2025, karena anggarannya di satukan dengan Stasiun KIPM Bandung, namun secara organisasi SOTK Penyatuan tersebut belum terbit, sehingga secara organisasi Stasiun KIPM Bandung tetap Stasiun KIPM Bandung, namun tidak mempunyai anggaran. Tentunya akan menghambat terhadap penetapan dan pencapaian kinerja, untuk itu perlu adanya strategi dalam penentuan Perjanjian Kinerja mengingat penetapan organisasi baru akan membutuhkan waktu yang tidak cepat.
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/triwulanan/semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh eksternal.
- Indikator Kinerja yang nilai capaiannya melebihi 120%, agar dapat

disesuaikan targetnya pada tahun 2025, yaitu :

1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup SKIPM Bandung
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup SKIPM Bandung
3. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI Lingkup SKIPM Bandung
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung
5. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung
6. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup UPT SKIPM Bandung

4.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI SEBELUMNYA

Tindak Lanjut berdasarkan Rekomendasi Triwulan III Tahun 2024, yaitu :

1. Setiap penanggung jawab IKU telah Menyusun bukti dukung dengan Baik dalam bentuk File PDF.
2. Telah dilakukan Koordinasi dengan penanggung jawab IKU terkait dengan persiapan verifikasi capaian kinerja
3. Dokumen Perencanaan Kinerja, Pelaksanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja telah di publikasikan melalui web Site PPID Stasiun KIPM Bandung

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN BANDUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Anak Agung Gede Eka Susila**
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Bandung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Bandung

Anak Agung Gede Eka Susila

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN BANDUNG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70
		3.	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	99
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70
SK.3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Stasiun KIPM Bandung	6.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Bandung (Indeks)	3,36
		7.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (Indeks)	86
		8.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Stasiun KIPM Bandung (Nilai)	75
		9.	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (Nilai)	82
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (Nilai)	71
		11.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (Nilai)	93,76
		12.	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	100
		13.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	80
		14.	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	80
		15.	Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	80

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2024	3,377,516,000
2.	Manajemen Mutu	593.500.000
3.	Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	198,000,000
Total Anggaran Stasiun KIPM Bandung Tahun 2024		4,169,016.000

Jakarta, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Bandung



Anak Agung Gede Eka Susila

DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup SKIPM Bandung

RUMUS

$$\text{Persentase komponen Sertifikat} = \frac{\text{Sertifikat yang diterbitkan}}{\text{Permohonan yang memenuhi Syarat Sertifikat}} \times 100$$

NO	Sertifikasi Primer	Sertifikat yang diterbitkan	Permohonan yang Memenuhi Syarat	%
1	CBIB			
2	CPIB			
3	CPPIB			
4	CPOIB	1	1	100
5	CDOIB			
6	CBIB Kapal			

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB

F = Persentase Unit Usaha menerapkkn CPIB Kapal

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*

Tahun 2024 Sertifikasi sektor produksi primer yang dilaksanakan hanya CPOIB

Jadi :

$$\text{Presentase Pimer} = \frac{100}{1} \times 100\%$$

$$\text{Presentase Pimer} = 100\%$$



Mengetahui
Kepala SKIPM Bandung

Anak Agung Gede Eka Susila, S.Pi., M.Sc

Cimahi, 9 Januari 2025
Penanggung jawab IKU

Andriani Deni Efendi, A.Md



DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup SKIPM Bandu

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\% \quad \%X = \frac{HACCP+SKP}{2} \times 100\% \quad \%X = \frac{100+97,44}{2} \times 100\%$$

$$\%X = 98,72 \%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

NO	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Sertifikat HACCP	20	20	100
2	SKP	39	38	97.44

DATA HACCP TAHUN 2024

NO	TW	Nama UPI	No Sertifikat HACCP	Ruang Lingkup/ Produk	Grade	Berlaku	TANGGAL PELAKSANAAN
1	I	UKM Risya	036/PM/HACCP/PB/02/24	Frozen Value Added produc seafood	B	06 feb 2026	30 Januari
2		PT. Bahari Pratama Mandiri	007/PM/HACCP/PB/02/23	Frozen damersal fish	B	06 Februari 2025	31 Januari (Kegiatan Monev)
3			006/PM/HACCP/PB/02/23	Frozen cephalopod	B	06 Februari 2025	
4			008/PM/HACCP/PB/02/23	Frozen tuna	B	06 Februari 2025	
5			005/PM/HACCP/PS/02/23	Fresh Tuna	B	06 Februari 2025	
6		CV. Mitra Ratu Mandiri	009/PM/HACCP/PB/02/23.	Frozen damersal fish	B	06 Februari 2025	1 feb (keg Monev)
7	II	PT Cempaka Hirina	044/PM/HACCP/PK/05/24	Prawn Crackers	B	28 Mei 2026	8 Mei 2024
8			045/PM/HACCP/PK/05/24	Squid Crackers	B	28 Mei 2026	8 Mei 2024
9			043/PM/HACCP/PK/05/24	Fish Crackers	B	28 Mei 2026	8 Mei 2024
10			042/PM/HACCP/PK/05/24	Crab Crackers	B	28 Mei 2026	8 Mei 2024
11	III	CV. Duta Ratu	056/PM/HACCP/PB/05/24	Frozen damersal fish	B	19 Mei 2026	
12			055/PM/HACCP/PB/05/24	Frozen cephalopod	B	19 Mei 2026	
13			057/PM/HACCP/PB/05/24	Frozen Pelagic Fish	B	19 Mei 2026	
14			058/PM/HACCP/PB/05/24	Frozen Shrimp	B	19 Mei 2026	

15	IV	PT. IKA Food Putramas	057/PM/HACCP/PF/11/24	Shrimp Paste	B	20 November 2026	11 November 2024
16	V	CV. Global Pangan Sadulur	062/PM/HACCP/PB/11/24	Frozen Milkfish	C	20 November 2026	12 November 2024
17	VI	PT. Brata Adi Laksana	363/PM/HACCP/PK/10/23	Fish Snack	B	11 Oktober 2025	
18	VII	Kurnia Mitra Makmur	056/PM/HACCP/PB/09/24	Frozen Farm Raished fish	B	11 Sepetember 2026	6 September 2024
19			126/PM/HACCP/PB/12/23	Frozen breaded Fish	B	12 Desember 2025	Monev
20			063/PM/HACCP/PB/11/23	Frozen Pelagic Fish	B	16 November 2025	Monev

DATA SKP TAHUN 2024

NO	Uraian	Sertifikat yang terbit	Rekom Sertifikat	%
1	SKP	38	39	97.44

Mengetahui
Kepala SKIPM Bandung



Agung Gede Eka Susila, S.Pi., M.Sc

Cimahi, 7 Januari 2025
Penanggung jawab IKU

Andriani Deni Efendi, A.Md

ing

DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

IK3. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI Lingkup SKIPM Bandung

Persentas Persentase pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI Lingkup UPT SKIPM Bandung sebesar 100%

$$\%X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

$$\%X = \frac{\text{Jumlah kab/kota /yang dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI}}{\text{Jumlah kab/kota/yang ditetapkan untuk dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI}} \times 100\%$$

$$\%X = \frac{4}{4} \times 100\%$$

DATA KEGIATAN

No	PELAKSANAAN	
	KAB/KOTA	LOKASI
1	Kota Bandung	Pasar Kosambi
		Pasar Modern Citylink Bandung
2	Kota Cimahi	Pasar Antri
		Superindo Cimahi
1	Sukabumi	TPI Ciwaru
		TPI Pelabuhan Ratu
2	Kab Bandung	Pasar Sehat Soreang
		Pasar Ciparay



Cimahi, 6 Januari 2025
Penanggung jawab IKU

Isep Wahyudin, S.Pi

DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

IK4. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung

NO	BULAN	JUMLAH HC DITERBITKAN	JUMLAH HC YANG DITOLAK
1	JANUARI	20	0
2	FEBRUARI	25	0
3	MARET	45	0
4	APRIL	15	0
5	MEI	20	0
6	JUNI	20	0
7	JULI	20	0
8	AGUSTUS	21	0
9	SEPTEMBER	20	0
10	OKTOBER	26	0
11	NOVEMBER	14	0
12	DESEMBER	2	0
	JUMLAH	248	0

$$X = \frac{A-B}{A-B} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Ekspor} = \frac{\text{HC yang diterbitkan} - \text{Jumlah HC yang ditolak}}{\text{HC yang diterbitkan}} \times 100\%$$

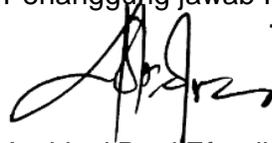
$$\text{Rasio Ekspor} = \frac{248 - 0}{248} \times 100\%$$

Jadi Rasio Ekspornya sebesar 100%



Anak Agung Gede Eka Susila, S.Pi., M.Sc

Cimahi, 6 Januari 2025
Penanggung jawab IKU



Andriani Deni Efendi, A.Md

DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

IK5. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung

NO	PELAKSANAAN	NILAI
1	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung	83,10

Berdasarkan Surat dari Pusat MM

Mengetahui
Kepala UPT KIPM Bandung



Anak Agung Gede Eka Susila, S.Pi., M.Sc

Cimahi, 13 Januari 2025
Penanggung jawab IKU

Ridwan Purnama, SST

DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2024

IK6. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Bandung

NO	NILAI SKM	NILAI IKM
1	95,44	3,82

Berdasarkan Memorandum Sekretaris BPPMHKP
Nomor 95/BPPMHKP.1/KI.120/I/2025



Cimahi, 13 Januari 2025
Penanggung jawab IKU

Zaenal Arifin, A.Md

DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

IK 7. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung

REALISASI CAPAIAN NILAI IP ASN

NO	URAIAN	TW 4
1	NILAI IP ASN	91,78



Mengetahui
Kepala KIPM Bandung

Anak Agung Gede Eka Susila, S.Pi., M.Sc

Cimahi, 6 Januari 2025
Penanggung jawab IKU

Zaenal Arifin, A.Md

DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

IK8. Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup SKIPM Bandung

Nilainya adalah 79,37



Mengetahui
Kepala SKIPM Bandung

Anak Agung Gede Eka Susila, S.Pi., M.Sc

Cimahi, 8 Januari 2025
Penanggung jawab IKU

Zaenal Arifin, A.Md

DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

IK 9. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT SKIPM Bandung

NO	URAIAN	NILAI
1	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP	83,65



Mengetahui
Kepala UPT SKIPM Bandung

Anak Agung Gede Eka Susila, S.Pi., M.Sc

Cimahi, 6 Januari 2025
Penanggung jawab IKU

Zaenal Arifin, A.Md

DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

IK10. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung

NO	URAIAN	NILAI
1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT SKIPM Bandung (Nilai)	86,67



Mendatangi
Kepala SKIPM Bandung

Enak Agung Gede Eka Susila, S.Pi., M.Sc

Cimahi, 13 Januari 2025
Penanggung jawab IKU

Zaenal Arifin, A.Md

DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

IK 11. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung

REALISASI CAPAIAN NILAI IKPA

NO	URAIAN	TW 1	TW 2	TW3	TW4
1	REALISASI NILAI IKPA	Belum ada Realisasi	95,46	Belum ada Realisasi	95,59



Mengetahui
Kepala SKIPM Bandung

Anak Agung Gede Eka Susila, S.Pi., M.Sc

Cimahi, 9 Januari 2025
Penanggung jawab IKU

Zaenal Arifin, A.Md

DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

IK 12. Presentase Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung

NO	URAIAN	Persentase
1	Presentase Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung	100%



Mengetahui
Kepala UPT Stasiun KIPM Bandung

Anak Agung Gede Eka Susila, S.Pi., M.Sc

Cimahi, 6 Januari 2025
Penanggung jawab IKU

Zaenal Arifin, A.Ivd

DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

IK13. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT SKIPM Bandung

NO	URAIAN	TRIWULAN IVTAHUN 2024
1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	100

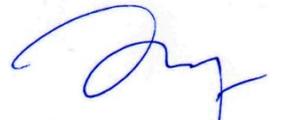
Berdasarkan Aplikasi dari Itjen (SIDAK) per tanggal 2 Januari 2025, Terealisasi 100% dari target 80 %

Mengetahui
Kepala SKIPM Bandung



Anak Agung Zede Eka Susila, S.Pi., M.Sc

Cimahi, 6 Januari 2025
Penanggung jawab IKU



Zaenal Arifin, A.Md

DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

IK14. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP Lingkup SKIPM Bandung

REALISASI TINGKAT KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/JASA

NO	URAIAN	NILAI
1	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP Lingkup SKIPM Bandung	84,34



Mengetahui
Kepala SKIPM Bandung

Anak Agung Gede Eka Susila, S.Pi., M.Sc

Cimahi, 6 Januari 2025
Penanggung jawab IKU

Zaenal Arifin, A.Md

DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

IK 15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup SKIPM Bandung

REALISASI TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN BMN

NO	URAIAN	NILAI
1	REALISASI	97,50

Mengetahui
Kepala SKIPM Bandung



Anak Agung Gede Eka Susila, S.Pi., M.Sc Zaenal Arifin, A.Md

Cimahi, 6 Januari 2025
Penanggung jawab IKU